



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
KE KOTA SOLO PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2018 – 2019  
TANGGAL 20 AGUSTUS 2018**

.....

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Solo adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan di bidang pengawasan Pelayanan Publik, khususnya terkait dengan pengawasan kinerja Pemko Solo dalam melakukan Pelayanan Pada masyarakat.

Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kota Solo berjumlah 11 orang Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 1 (satu) Tenaga Ahli dan 3 (tiga) orang dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang reporter dari Lembaga Pemberitaan DPR RI.

**B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Agustus 2018 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Solo di aula Kantor Walikota Solo. Komisi II DPR RI diterima oleh Wakil walikota Solo dan jajarannya.

## II. HASIL KUNJUNGAN

### A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor Walikota Solo adalah Sebagai Berikut:

Pada hari Senin 20/08/2018 diadakan Kunjungan kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah kota Solo yang dihadiri oleh perwakilan Ombudman Jateng Alvin Lie dari Komisioner Ombudman RI, PJ Sekda Surakarta Utara, Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Said Romadhon, Asisten Pengembangan Ekonomi Drs. Triana M.m, Pimpinan Komisi 2 DPR RI Ninik, Wakil Walikota Surakartra Achmad Purnomo, OPD serta jajarannya

#### 1. Firman :

- a. Pencapaian Solo yang luarbiasa dimana minimnya laporan ke Ombudman hendaknya dilihat kembali jangan sampai ini semua karna besarnya rasa “sungkan” di budaya Jawa.
- b. Kemudian terkait Pasar Klewer apa yang membuatnya menjadi istimewa sehingga mendapat penghargaan bahkan dunia pun menyoroti?
- c. bagaimana masalah sampah yang menjadi sorotan di berbagai daerah, bagaimana pengelolaannya di kota Solo?
- d. Tenaga Honorarium bagaimanakah solo mengurusnya? Mengingat memang ini masalah menahun dari zaman SBY. Apakah selama ini membebani APBD? Mengingat banyaknya tuntutan untuk gaji yang setara golongan 2 .

#### 2. Dadang :

- a. Salut dengan Surakarta yang gaungnya tinggi. Namun team work dari pemkot rasanya kurang karena Wakil Walikota sendiri tidak hafal bawahannya. Solo bebas korupsi, bagaimana dengan KKN? (Tdk Perlu dijawab)
- b. Pelayanan terpadu itu bisa selesai berapa jam (pengurusan izin), berapa hari investor bisa keluar izin? Apakah melalui walikota atau tidak? Mengingat PERLU untuk lapor walikota. Jadi berapa hari?
- c. Kira-kira penduduk yang sudah tercatat memiliki hak pilih, terutama 1200 orang yang harusnya memiliki ktp, bisa benar-benar memiliki ktp

elektronik tidak ketika masa pilpres dating, yang jadi persoalan ke-1200 orang itu apa?

3. Endro :

- a. Pelayanan yang nyaris tidak ada pelaporan, apakah karena masyarakat tidak tahu? Karena ketika turun kelapangan memang masih ada beberapa keluhan
- b. Pengelolaan sampah, mengenai investor swasta masuk sekarang ini sudah berapa jauh? (Mengenai waste energy), apakah nilai jualnya sudah masuk? Kita perlu hati-hati mengingat jika nilai jualnya masih belum sesuai dengan pasar maka kemungkinan akan sia sia dan pelayanannya melambat.

4. Supriatna :

- a. Terobosan Pemkot sangat baik dan perlu diapresiasi, ORI berikan catatan mengenai beberapa layanan yang belum terintegrasikan, bagaimana dengan ULAS (Unit Layanan Surakarta) yang tahun lalu sudah mencapai 500 orang pengguna, bagaimana kemajuannya sekarang?
- b. Seberapa jauh keberpihakan belanja public? (60:40)
- c. Mengenai destinasi wisata, bagaimana pemanfaatannya serta pengelolaannya demi kesejahteraan rakyat?

5. Yanuar :

- a. Jika boleh tau apa problem, hambatan, masalah maupun kendala yang dihadapi selama menyediakan pelayanan public. Seberapa parah kategori hambatan tersebut, dan sektor apa yang masih memerlukan perhatian lebih?
- b. Layanan wisatanya apakah sudah optimal, indikator meningkatnya apa saja?

6. Ombudsmen Jateng :

- a. Jumlah laporan masuk ke ombudsmen 2014 7 laporan, 2015 2 laporan, 2016 4 laporan, 2017 0 laporan, 2018 1 laporan. Kesemua

ini adalah laporan yang layak ditindak lanjuti. Bukan kesemua laporan yang masuk.

- b. Pemerintahan kota Surakarta masih di kategorikan di zona kuning (2016-2017) yang artinya masih belum memenuhi standar pelayanan. Diantaranya masih kurangnya pengetahuan tentang layanan yang di miliki, rendahnya partisipasi masyarakat, pelayanan terpadu belum terintegrasi. Ruang untuk laktasi serta fasilitas anak-anak masih belum memenuhi standar. Mengenai ULAS menurut catatan kami mencapai 500 laporan, pengaduan ke walikota solo hingga ke OPD masih belum terdeteksi. Namun demikian ombudsman memegang komitmen pemkot yang akan mengintegrasikan itu semua
- c. Anggaran ombudsman sendiri dibatasi oleh Kemenkeu sehingga ini menjadi kendala terbesar yang dihadapi ombudsman
- d. Sosialisasi ombudsman sendiri sudah cukup baik dengan dibentuknya program *konco* ombudsman yang ditingkat desa, kampus hingga kota. Mereka duta ombudsman yang dekat dengan masyarakat sekitar. Ombudsman aktif dalam sosialisasi secara langsung ke masyarakat melalui *Car Free Day*.
- e. Beberapa problem yang dihadapi ombudsman yaitu adanya kecenderungan masyarakat lebih nyaman tatap muka saat ada masalah. Adanya budaya sungkan (takut melapor), masyarakat juga enggan dimintai keterangan detail.

#### 7. Tuti :

- a. Mengenai UMKM, Pemerintah Kota Solo ingin menjadi salah satu Smart City, dengan jalan menyediakan system pelayanan online disetiap kelurahan dengan tujuan mempermudah perizinan, serta mengembangkan potensi wisata. Berapa jumlah kelurahan yang memiliki fasilitas ini? Lalu responnya bagaimana? Caranya bagaimana, kendalanya apa saja? Apakah sudah berjalan dengan semestinya?

- b. Jawaban Wakil Walikota :
- c. Koordinasi terkait dengan *Team work* sebenarnya sudah bagus, hampir tidak ada batasan kami dengan semangat kekeluargaan selalu berkoordinasi satu sama lain. Penyebab
- d. Di Surakarta dinobatkan sebagai Kota Layak Anak nomor 2 di Indonesia dan
- e. Tentang Laporan yang minim dari pemerintah Ombudsman, karena hubungan antara walikota dengan rakyat sedemikian dekat.
- f. Dengan adanya kegiatan setiap hari Jumat yaitu “mider” beserta rombongan yang menggunakan ratusan sepeda sekaligus meresmikan pembangunan di daerah-daerah
- g. Kegiatan yang kedua kegiatan “Sonjowargo” , yakni setiap hari tertentu mengunjungi kelurahan ataupun rumah tokoh masyarakat untuk menampungberbagai permasalahan dalam masyarakat
- h. Karena aktifnya Pemerintah Kota dalam mencari dan menampung masalah, sehingga masyarakat lebih mengadu kepada pemerintah kota dibandingkan Ombudsman.
- i. Adanya komunikasi pemerintah kota dengan pedagang kaki lima yang disediakan tempat ketika dipindah tempatkan, dan di proseskan ijin tempat.
- j. Jawaban untuk Bapak Firman, tentang permasalahan Klewer, para pengusaha atau pemilik kios sama sekali tidak dipungut biaya. Dengan ketentuan pemillik yang dulu menyerahkan kepada pemilik yang baru serta sekaligus penertiban surat ijin.
- k. Tentang pengelolaan sampah, menjawab pertanyaan pak Indro dan pak Yanuar. Selama ini pemerintah kota menjemput dengan mobil box pada tiaptiap rumah, lalu dibuang ke TPS akhir yang sekarang ini sedang dalkam proses pembicaraan penyelesaian MOU Taken dengan pihak Swasta dari Jakarta Solo Citra Metro Plasma. Tinggal menunggu penandatanganan yang nantinya sampah itu akan di inversi menjadi listrik, kemudian listriknya ditampung dan dijual ke PLN. Oleh karena itu Solo dinobatkan sebagai kota percobaan pengelolaan Sampah.
- l. Untuk pelayanan public 60 persen anggaran dari pemerintah.

### **Jawaban mengenai Reegulasi :**

1. Jawaban Untuk Dadang : Secara regulasi mesti dibawah mspk kementrian, kita memiliki SOP, memiliki sertifikat ISO. Tetapi biasanya pelaku usaha itu tidak bisa membedakan mana ranah persyaratan mana ranah regulasi waktu yang ditentukan. Biasanya persyaratan itu dihitung waktu perizinan. Padahal kalau kita berbicara amdal, amdal sendiri selesai minimal 2-3 bulan padahal itu tidak termasuk waktu perizinan, ini seharusnya diurus sebelum mengurus perizinan. Kalau ada Investor besar tentu menghadap dulu ke Walikota, minimal yang diajak itu dua dinas perizinan dan tata ruang kota, sehingga semua mengetahui dan tidak ada yang menyalahi aturan. Semisal lahan yang boleh untuk hotel tentu diperbolehkan dibangun hotel.
2. Hambatan dan sebagainya, ada dua internal dan eksternal. Internal sendiri ya sdmnya terbatas mengingat setiap tahun ada sdm yang paripurna sementara rekrutmen sendiri terbentur dengan adanya moratorium. Untuk eksternal justru datang dari masyarakat, dimana seringkali masyarakat menuntut dengan aksi minta kompensasi. Tentu menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut (jika regulasi sudah dipenuhi). Terkadang masyarakat sendiri yang tidak mau tahu. Padahal dengan adanya usaha baru diwilayah tersebut secara tidak langsung pemerintah juga menghadirkan lapangan pekerjaan dengan skema regulasi 40% pegawai dari daerah sekitar usaha, 40% Pekerja asal Surakarta, 20% Pendatang.

### **Tanggapan Firman :**

- ✓ Lebih baik persyaratan 40,40,20 itu ditaruh dalam surat perizinan, agar Bupati/Walikota dapat mengawal secara langsung

### **Lanjutan Tanggapan Wakil Walikota :**

1. Sebutan Solo itu universal, untuk Surakarta dan Sekitarnya (Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Boyolali) sehingga ketika menanyakan soal Solo perlu digali lebih lanjut Solo yang dimaksud itu mana.
2. Selanjutnya masalah yang dihadapi kota Surakarta ini sebenarnya masalah geografis, letak Surakarta itu strategis selain itu penduduk kota ini juga yang terpadat di Jawa Tengah. Pada malam hari jumlah penduduk kota Surakarta 550 Ribu orang, namun ketika siang hari jumlahnya melonjak hingga menjadi

2,2 juta orang termasuk yang bekerja dan beraktivitas di Surakarta (karena 6 Kabupaten sekeliling Surakarta)

3. Terkait transportasi ketika DPR RI ingin membantu kota Solo maka sejatinya telah membantu 6 Kabupaten sekitarnya juga karena memang fasilitas yang disediakan kebanyakan jugalah orang-orang luar Surakarta yang memakainya. Seperti BST (Batik Solo Trans) yang melayani hingga Kartosuro. Solo baru misalkan sejatinya merupakan Kabupaten Sukoharjo namun berkembang atas nama Solo. Pembangunan saat ini kami galakkan juga dibantu dengan pemerintah pusat seperti jalan layang Manahan hingga purwosari
4. UMKM, Memang rencana tersebut sudah ada, namun lebih lanjut akan dijelaskan dinas terkait.

Dinas Kominfo Enthis :

- ✓ Aplikasi sedang disusun dan memang belum ready dipakai, direncanakan November sudah selesai dan akan disosialisasikan oleh Dinas UMKM termasuk UMKM yang terpilih sebagai percontohan.

### **C. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor Gubernur Riau.**

Kunjungan anggota Komisi II DPR RI ke Kantor Walikota Solo untuk mengetahui secara langsung terhadap Pemerintah Daerah Melakukan Pelayanan Publik Pada Masyarakat. Komisi II DPR RI dengan ini mengetahui Program Baru Pemko Solo dalam melakukan Pendataan Penduduk dengan Nama **BESUK KIAMAT** yaitu Bela Sungkawa Kirim Akte Kematian. Program ini secara efektif langsung menyentuh masyarakat karena dilakukan tanpa biaya, cepat dan akurat untuk sebagai ketabulasian tingkat kependudukan.

#### **D. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kota Solo pada tanggal 20 Agustus 2018. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.